

http://kabar-banten.com/news/detail/15405

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

PERBAIKAN JALAN RUSAK, PEMPROV BANTEN DINILAI TAK FOKUS

Monday, 30 Sep 2013 | 15:30:33 WIB

SERANG, (KB)-

Pemprov Banten dinilai tidak fokus dalam perbaikan jalan rusak yang menjadi kewenangannya. Indikasinya, perbaikan jalan rusak belum tuntas, tetapi sudah beralih ke sektor lain yang bukan prioritas.

Hal itu disampaikan ekonomi Ufirta Dahnil Anzar, terkait dengan munculnya protes jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi di Kabupaten Tangerang, akhir pekan kemarin.

"Masalah politik anggaran, Pemprov Banten saya pikir serupa saja dengan kab./kota. Saya buat analogi ibarat orang Islam 'Tidak Salat Subuh tapi ngotot Salat Duha' Kira-kira begitulah perspektif politik anggaran Pemprov Banten.

Yang primer seperti jalan raya belum dituntaskan tapi nafsu mengalokasikan anggaran untuk sektor yg skunder bahkan tersier. Jadi APBD gagal menjadi alat pembangunan," katanya.

Ia menuturkan, berkenaan dengan prioritas anggaran bagi infrastruktur jalan, dirinya pernah menyampaikan saat pembahasan RKPD bersama DPRD Banten.

Menurut dia, selama lima tahun ke depan harus dialokasikan anggaran Rp3.5 triliun untuk perbaikan jalan. Mengingat, kapasitas fiskal Banten itu rata-rata setiap tahun sekitar Rp4 triliun sampai Rp5 triliun.

"Minimal Rp500 miliar setiap tahun untuk infrastruktur jalan," tuturnya.

Ia mengatakan, pendirian Bank Banten yang menghabiskan anggaran Rp1 triliun itu dianggap prioritas dibandingkan jalan raya yang rusak. "Apabila menengok model penganggaran APBD Banten yang abai prioritas maka Perda Percepatan Infrastruktur itu berhenti jadi dokumen kosong saja tanpa implementasi," ucapnya.

Ia mengatakan, protes Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar terkait jalan provinsi di Kabupaten Tangerang yang rusak parah merupakan hal yang konstruktif agar mendorong percepatan pembangunan di daerahnya. Namun demikian, kata dia, jangan sampai karena pihak lain yang abai tanggung jawabnya, daerah seperti Kabupaten Tangerang, mendapat dampak perlambatan pembangunan ekonomi.

"Harus fair juga sibuk menegur kewajiban pembangunan jalan provinsi tapi abai memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Tangerang," katanya.

Ia mengatakan, pemprov dan kab./kota perlu melakukan harmonisasi perencanaan dan alokasi belanja pembangunan untuk menetapkan skala prioritas dalam pembangunan. "Prioritas pemprov maupun kab./kota hari ini seharusnya adalah perbaikan infrastruktur yang rusak," katanya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten Sutadi belum bisa dikonfirmasi terkait dengan keluhan jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Tangerang. Saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Minggu (29/9), Sutadi tak merespon. (H-32)***

Dibaca : 92 kali

Kabar-Banten ePaper

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/15307

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

USUT TUNTAS KASUS DANA HIBAH

Thursday, 26 Sep 2013 | 12:23:26 WIB

SERANG, (KB)- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Banten (APMB) dan Revolusi Tunas Muda Banten (RTMB) menggelar demo dan aksi treatikal berupa gantung diri. Aksi ini dilakukan di depan pintu masuk kantor Pemprov Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (25/9). Seorang pengunjung rasa terlihat bergelantung dengan tali terilit di leher dan dipasangi karton bertuliskan 'Gantung Mafia Hibah'. Seorang temannya menjaga aktivis tersebut agar tali tidak terilit ke leher. Sementara beberapa aktivis yang lain melakukan orasi. Unjuk rasa dan 'gantung diri' dilakukan selama kurang lebih satu jam.

Demo dengan aksi treatikal ini dilakukan terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) oleh Pemprov Banten sejak 2011, 2012, dan 2013 yang dianggap bermasalah.

Dalam orasinya, mereka pun mendesak Kejati Banten untuk berani mengusut tuntas kasus hibah. Penuh rekayasa

Koordinator lapangan, Yudi Sugiat dalam orasinya menyatakan, prihatin atas kasus hibah yang antara lain menimpa sejumlah pengurus pondok pesantren. Hal ini terjadi karena penyaluran dana hibah diduga penuh rekayasa lantaran banyak disunat oleh oknum pejabat di Pemprov Banten.

Mencari penerima

Sementara Ketua APMB, Yaya Baihaki mengungkapkan, berdasarkan pengakuan penerima menjadi korban penyunatan hibah, ada oknum pejabat yang bertugas mencari penerima hibah. Berdasarkan penelusurannya, ada sedikitnya empat lembaga yang tidak menerima dana hibah dan bansos secara penuh.

"Kami mencatat ada ponpes di Kabupaten Lebak yang mendapatkan bansos 2012 senilai Rp25 juta tetapi hanya diterima Rp5 juta," katanya.

Selain itu, menurut dia, ada sebuah yayasan yang tidak mengajukan proposal bansos 2011/2012 tetapi masuk daftar penerima senilai Rp25 juta. Padahal, katanya, lembaga ini tidak pernah mendapatkan uangnya.

"Atas kondisi ini kami meminta Kejati Banten mengusut kasus dana hibah jika ingin membenahi Banten," tuturnya.

Kepala Biro Kesra Pemprov Banten, Mashuri saat dikonfirmasi wartawan menanggapi biasa demo tersebut. Pasalnya, demo soal dana hibah dan bansos sudah biasa terjadi.

Minta dibuktikan

Ia menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya permasalahan dugaan pemotongan dana hibah kepada lembaga penegak hukum. "Semuanya kami serahkan kepada lembaga penegak hukum," ujarnya.

Terkait adanya dugaan oknum pegawai yang memotong penyaluran dana hibah dan bansos, menurut dia, hal tersebut perlu dibuktikan. "Sebab, kalau tidak ada bukti, hal itu bisa merupakan tindakan pencemaran nama baik," katanya. (H-32)***

TERKAIT

- Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat Pemprov S...
- Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten 2011, Eks...
- Kasus YPI Sholatiyah Belum Ada Tersangka Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200 Juta M...
- Penerima Hibah Dikumpulkan, Jangan Percayai "Bro..."

Kabar-Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL
HALLOWEEN NIGHT
TGL. 5, 12, 19 & 26 OKTOBER 2013
COMING SOON TO THE GREAT SCREEN
www.kabarpaper.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isha	18:55

kabar banten | kabar Banten Kritis... | kabar banten septe... | 1:36 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/15296

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KASUS DANA HIBAH YPI SHOLATIYAH, PEJABAT PEMPROV SEGERA DIPERIKSA

Wednesday, 25 Sep 2013 | 10:20:45 WIB

SERANG, (KB)-
Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang terus melengkapi keterangan sejumlah saksi kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Banten Rp600 juta kepada YPI Sholatiyah. Pekan ini, dijadwalkan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk pejabat Biro Kesra dan Biro Ekbang Pemprov Banten.

"Masih terus kami periksa saksi-saksi. Minggu ini ada jadwal pemeriksaan kabag dan kasubag dari Ekbang dan Kesra yang terkait penyaluran dana tersebut," kata Kasi Pidus Kejari Serang, Triono Rahyudi, SH, dikonfirmasi via ponsel, Senin (23/9).

Triono mengatakan, beberapa waktu lalu penyidik kembali memeriksa sejumlah pengurus YPI Sholatiyah. "Jumat kemarin pengurus diperiksa, ada bendahara juga. Ya, kami terus melengkapi unsur-unsur yang ada dengan memeriksa saksi-saksi, terus melengkapi bukti-bukti,"ungkapnya.

Disinggung soal status Ketua YPI Sholatiyah, Triono menyatakan, ling masih berstatus sebagai saksi. Ia menjelaskan, dalam laporan tidak disebutkan terlapor. Melainkan hanya peristiwa yang diduga pidananya saja. "Waktu itu, dalam laporan tidak menyebut nama. Lagi pula tersangka tidak harus terlapor, bisa saja yang lainnya. Makanya kami periksa semua pihak yang terkait,"katanya.

Terus mangkir
Sementara itu, seorang penyidik, Subardi, SH mengatakan, dalam perkara tersebut sejauh ini sudah dua kali pemanggilan terhadap ling. Namun, hingga saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan. "Penyelidikan sudah dipanggil tidak hadir. Di penyidikan sudah juga tapi masih belum memenuhi panggilan,"katanya.

Untuk diketahui, kasus dana hibah ini mencuat pascapemecatan yang dilakukan YPI Sholatiyah terhadap lima guru. Pemecatan dilakukan setelah para guru itu mempertanyakan soal penggunaan dana hibah yang diterima YPI Sholatiyah Rp600 juta dari Pemprov Banten tahun 2012. Pemecatan itu kemudian memunculkan reaksi dari murid dan guru lainnya. Mereka mendesak Ketua YPI Sholatiyah, ling Tufatul Ghorob mundur dari jabatannya. ling akhirnya mengundurkan diri. (H-42)**

Dibaca : 69 kali

Facebook Twitter Share Email Print

Kabar Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL
HALLOWEEN NIGHT
TGL. 5.12.19 & 20 OKTOBER 2019
COMING SOON TO
THE THEATRE
www.kabarpaparfri.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/15256

KABAR BANTEN.com
Grup Penerbitan Rakyat

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

DUGAAN KASUS KORUPSI, KADISDIK PANDEGLANG DITAHAN

Tuesday, 24 Sep 2013 | 12:47:21 WIB

PANDEGLANG, (KB).- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pandeglang, Aa dibebaskan ke penjara oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Senin (23/9). Orang nomor satu di Disdik itu diletakkan tersangka dugaan korupsi pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (SD) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 Rp1,6 miliar.

Menurut pemantauan Kabar Banten, sebelum ditahan, Aa yang didampingi tim kuasa hukumnya, sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik sejak pukul 09.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan, Aa yang mengenakan pakaian dinas, sekitar pukul 14.20 WIB dijemput petugas kejar menggunakan mobil tahanan menuju rutan.

Saat memasuki mobil tahanan, Aa hanya menundukkan kepala. Bahkan, ketika wartawan hendak mengajukan beberapa pertanyaan, Aa tidak memberikan jawaban. Ketika itu, Aa hanya menyampaikan dirinya saat ini sedang berjihad melawan kezoliman, sambil masuk ke dalam mobil tahanan.

Ditemu sesuai penahanan tersebut, Kajari Pandeglang, Siti Ratnah, SH, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Masmudi, SH menyatakan, penahanan tersangka Aa sudah sesuai ketentuan dan pertimbangan penyidik.

Selain dua unsur alat bukti sudah terpenuhi, upaya penahanan ini dilakukan karena pihaknya khawatir tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

"Mula saat ini, tersangka Aa resmi kami tahan dan kami litkan di Rutan Kelas II B Pandeglang," kata Siti Ratnah, SH, Senin (23/9).

Siti Ratnah menjelaskan, tersangka akan menjalani penahanan 20 hari ke depan, tepatnya sejak Senin (23/9). Penahanan tersangka akan diperpanjang apabila masa tahanannya habis, sambil menunggu berkas perkarannya dinyatakan lengkap oleh penyidik.

"Ya, kalau masa tahanannya habis bisa diperpanjang bergantung kelengkapan berkas perkarannya," ujarnya.

Terkait penahanan, Siti Ratnah mengaku, pihaknya sudah memberitahukan ke pembab sejak penetapan tersangka. Termasuk untuk keluarga tersangka sejauh ini sudah dibertahu.

"Keluarganya sudah kami bertahu," ujarnya.

Di bagian lain, terkait upaya penanggulangan penahanan tersangka yang dilakukan pembab, menurut dia, sejauh ini belum ada surat permohonan yang masuk ke kejar mengenai hal itu.

Bukan testimoni

Selain itu, terkait penetapan tersangka berdasarkan testimoni dan adanya kabar yang berkembang aliran dana alper itu mengalir ke pejabat lain, Siti Ratnah menegaskan, penetapan tersangka berpatokan dari hasil BAP, bukan testimoni.

"Mengenal adanya aliran dana ke pejabat lain di lingkungan pembab, itu juga masih kami telusuri. Hanya yang jelas, untuk sementara, ini tersangka kedelapan, yaitu Aa," tuturnya. (H-38)***

Jadwal Sholat	Sumber	PkDU	tgl	24 Oct 2013
Subuh				04:35
Syuruq				05:50
Dzuhur				11:51
Ashar				15:13
Maghrib				17:45
Isha				18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/15255

KABAR BANTEN.com
Grup Pikiran Rakyat

BKS
BINA & BINA ASHIBAH KE BANGSA
Perencanaan - Digital Printing - Advertising

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

BPKP TAK BERWENANG HITUNG KERUGIAN NEGARA

Tuesday, 24 Sep 2013 | 12:47:29 WIB

SERANG, (KB)-
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenang lagi dalam memeriksa dan menghitung kerugian keuangan negara. Hal ini berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Demikian disampaikan dalam duplik penasihat hukum Dadi Rustandi yaitu Ridwan, SH, dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan baju dinas bagi 85 anggota DPRD Banten senilai Rp590 juta tahun 2011, dipimpin majelis hakim diketuai Annastacia Tyas, SH di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (23/9).
Dalam dupliknya, Ridwan mengungkapkan, dalam Keppres No. 103 tahun 2001 pasal 52 dinyatakan, BPKP bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
"Penghitungan kerugian negara pada perkara korupsi mayoritas diakui dilakukan BPKP. Akan tetapi, praktik tersebut tetap salah dan melanggar peraturan. PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyebutkan, BPKP sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bertugas atas perintah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ungkapnya.
UU baru
la mengatakan, saat ini terdapat undang-undang yang baru, sehingga ketentuan untuk memeriksa dan menghitung kerugian negara melalui BPKP tidak berlaku. "Dalam ilmu hukum dikenal prinsip dengan istilah les posteriori derogat lex priori (peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan lama-red)," kata Ridwan, SH. Ia menilai, nota kesepahaman antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, 27 September 2007 yang ditandatangani Kejati Banten, Polda Banten, BPKP DKI Jakarta II, bertentangan dengan UU No. 15 tahun 2006 yang menyatakan, lembaga berhak memeriksa keuangan negara adalah BPK.
Seusai pembacaan duplik penasihat hukum, terdakwa Dadi juga membacakan duplik pribadinya dengan penekanan yang sama. Sidang kemudian ditunda hingga pekan depan dengan agenda putusan. (H-42)***

TERKAIT

- Putusan Dinilai tak Sesuai, Dadi Rustandi Banding
- Kasus Korupsi Baju Dinas, Eks Sekwan Divonis 2 Tah...
- Nota Pembelaan Kasus Baju Dinas: Dadi, "Ada Kesan..."
- Untungkan Orang Lain, Eks Sekwan Banten Dituntut 2...
- Lagi, Tuntutan Baju Dinas Ditunda

Kabar Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
TOL. 5.12.19 & 26 OKTOBER 2013
COMING SOON TO
www.demempaper.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

Dibaca - 43 kali

1:35 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/15219

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

PEMBANGUNAN JALAN, KEJATI SERIUS TANGANI KASUS TANJUNG LESUNG-SUMUR

Monday, 23 Sep 2013 | 01:42:49 WIB

SERANG, (KB)-

Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mulai mengumpulkan data (puldata) untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan pada proyek pekerjaan pembangunan jalan Tanjung Lesung (TL)-Sumur pada Kegiatan Pembangunan Wilayah Selatan di Dinas Bina Marga dana Tata Ruang (DBMTR) Banten Rp19,5 miliar TA 2012.

"Ya, laporannya masih dipelajari sambil puldata pulbaket, dikumpulkan dulu bahan-bahannya. Hanya memang tim belum ke lapangan," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten, Yopi Rulianda, SH, Jumat (20/9).

Yopi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai kasus tersebut. Pasalnya, kasusnya masih dalam tahap puldata pulbaket sehingga tidak bisa secara gamblang dipublikasikan.

"Puldata, pulbaket, maupun penyelidikan kan ada yang tertutup dan terbuka. Tidak mungkin kan semuanya dibuka, dibebaskan. nanti yang ada bisa saja misalnya ada yang dibagus-bagusin. Biarlah dulu tim bekerja, kalau sudah ditemukan indikasi pidananya baru ditingkatkan ke penyelidikan," ujar Yopi.

Ada pengerjaan

Sementara terpisah, DPW Generasi Muda dan Mahasiswa Merah Putih Banten, Erwin Teguh mengungkapkan, saat ini di lokasi yang sama kembali ada pengerjaan proyek betonisasi. Ia menduga, ada upaya untuk menghilangkan barang bukti.

"Saya kira itu ada upaya ke sana (menghilangkan barang bukti-red)," kata Erwin, dihubungi via ponselnya. Ia menilai, dengan adanya proyek betonisasi tersebut menghambur-hamburkan uang negara. "Kalau untuk alasan kondisi jalan hotmix yang tidak stabil memang benar. Akan tetapi, kalau pekerjaannya di lokasi yang sama, saya rasa anggaran untuk tahun 2012 itu mubazir dan percuma, menghamburkan uang negara saja. Lagi pula, apakah menjamin pekerjaan betonisasi itu maksimal," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, DPW Generasi Muda dan Mahasiswa Merah Putih Banten melaporkan proyek tersebut dengan nomor surat 010/lab-du/gemma mp/IX/2013. Dalam laporan tersebut Gema MP membeberkan hasil kajian dan analisis di lapangan dengan ditemukannya sejumlah dugaan penyimpangan pada proyek tersebut.

Sebelumnya juga telah diperkuat berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Tanjung Lesung-Sumur terindikasi merugikan keuangan negara yang harus di kembalikan ke kas daerah yakni senilai Rp6.045.324.812.

Hal-hal yang diduga terindikasi penyimpangan di antaranya ketebalan pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak mengakibatkan kekurangan pekerjaan senilai Rp1,2 miliar, kepadatan (density) pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) tidak sesuai ketentuan dalam kontrak senilai Rp437 juta. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, sejumlah kerusakan terjadi di bahu jalan. (H-42)***

Dibaca : 84 kali

Kabar-Banten ePaper

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/15172

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KASUS DUGAAN KORUPSI ALAT PERAGA OLAHRAGA, KADISDIK PANDEGLANG DITETAPKAN TERSANGKA

Saturday, 21 Sep 2013 | 00:51:25 WIB

PANDEGLANG, (KB) - Kadisdik Pandeglang, AA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alat peraga olah raga yang bersumber dari DAK tahun 2011 senilai Rp1,6 miliar oleh Kejari Pandeglang. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah keluarnya sprindik pada 16 September 2013. Kepala Kejari Pandeglang, Sitti Ratnah, SH didampingi Kasi Pidsus, Masmudi, SH saat ekspos perkara kasus ini menjelaskan, AA ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan dua alat bukti keterlibatannya dalam kasus tersebut. Dua alat bukti itu, yakni keterangan saksi dan keterangan ahli serta perbuatan melawan hukum.

"Betul AA sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan ini pemeriksaan perdana yang bersangkutan. Pemeriksaan seputar keterlibatannya dalam kasus itu," ujar Sitti Ratnah, SH, Jumat (20/9). Belum ditahan

Dalam menangani kasus ini, kata Kajari, tersangka disangkakan pasal 2 atau 3 juncto pasal 18 dan 55 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dengan ditetapkan AA jadi tersangka, total tersangka menjadi sembilan orang. Namun, baru tiga tersangka yang sudah ditahan, untuk AA, kami belum tetapkan ditahan atau tidak karena masih menunggu hasil pemeriksaan," katanya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Pandeglang, Masmudy menambahkan, dalam sprindik terdapat enam jaksa yang ditunjuk untuk menyidik kasus ini. Pemeriksaan AA sebagai tersangka, dilakukan pada Jumat kemarin pukul 09.00 WIB hingga selesai. Hingga menjelang rehat salat jumat sudah 18 pertanyaan diajukan kepada tersangka.

"Diperiksa dari pukul 09.00 WIB hingga selesai, mungkin sampai malam. Untuk ditahan atau tidak, kami belum putuskan itu," kata Masmudy yang menjabat Kasi Pidsus Kejari Pandeglang sejak 3 September 2013.

"Berkas tersangka lainnya akan kami limpahkan ke PN Tipikor Serang, namun sebelumnya kami sempurnakan dulu berkasnya," katanya.

Menurut dia, mengenai kerugian negara akibat kasus ini yang semula Rp500 juta, naik menjadi Rp622 juta. Jumlah kerugian itu naik berdasar LHP BPKP melakukan audit ulang.

Selain itu, pihaknya juga sedang melacak aliran dana hasil korupsi melalui PPKATK.

"Setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP kerugian negara menjadi Rp622 juta dari sebelumnya Rp500 juta. Kami juga akan melacak aliran dana itu melalui PPKATK," ujarnya. (H-18)***

Dibaca : 224 kali

Kabar Banten ePaper

SAFARI MALAM
SPECIAL HALLOWEEN NIGHT
TGL. 5, 12, 19 & 26 OKTOBER 2013
COMING SOON TO A THEATRE NEAR YOU
www.kabarpaper.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isha	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/15120

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA RP6 MILIAR LEBIH, KEJATI TANGANI TANJUNG LESUNG-SUMUR

Thursday, 19 Sep 2013 | 01:12:30 WIB

SERANG, (KB)-

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Banten merespon laporan proyek pekerjaan pembangunan jalan Tanjung Lesung-Sumur pada kegiatan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten Rp19,5 miliar TA 2012, yang diduga sarat penyimpangan. Pasalnya, Kajati sudah menunjuk Pidana Khusus (Pidsus) untuk menanganinya

Sebelumnya, Selasa (10/9) kasus dugaan korupsi itu dilaporkan organisasi karya pemuda (OKP) Generasi Muda dan Mahasiswa Merah Putih (Gemma MP) Provinsi Banten ke Kejati Banten.

"Sudah, laporan itu sudah ditangani bagian pidsus," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten, Yopi Rulianda, SH, dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (18/9).

Sedang dipelajari

Yopi mengatakan, berdasarkan informasi dari bidang pidsus, tim sedang mempelajari laporan tersebut. "Ya, itu masih dipelajari oleh bidang pidsus. Minggu kemarin kan baru masuk laporannya, jadi sampai sekarang masih dipelajari dulu," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak bisa memastikan laporan tersebut akan naik pada tahap puldata maupun penyelidikan. "Ya belum lah itu, belum puldata pulbaket maupun penyelidikan. Ini kan masih awal," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPW Generasi Muda dan Mahasiswa Merah Putih Banten, Erwin Teguh mengaku, sampai saat ini belum ada informasi perkembangan dari pihak kejaksaan mengenai laporan tersebut. Oleh karena itu, pekan depan pihaknya akan mempertanyakan laporannya.

"Kami akan lihat dulu perkembangannya, apabila prosesnya lambat, kami akan merencanakan aksi mendesak Kejati Banten agar dapat mempercepat proses laporan kami mengenai dugaan korupsi pada proyek Tanjung Lesung-Sumur," ujar Erwin, Rabu (18/9).

Sebelumnya, DPW Generasi Muda dan Mahasiswa Merah Putih Banten membeberkan hasil kajian dan analisis di lapangan dengan ditemukannya sejumlah penyimpangan pada proyek tersebut.

Pada proyek itu juga sebelumnya telah diperkuat berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Tanjung Lesung-Sumur terindikasi merugikan keuangan negara yang harus dikembalikan ke kas daerah senilai Rp6.045.324.812.

Hal-hal yang terindikasi penyimpangan di antaranya ketebalan pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak mengakibatkan kekurangan pekerjaan senilai Rp1,2 miliar, kepadatan (density) pekerjaan laston lapis antara (AC-BC) tidak sesuai ketentuan dalam kontrak senilai Rp437 juta. Diduga, akibat penyimpangan tersebut, sejumlah kerusakan terjadi di bahu jalan. (H-42)***

Dibaca : 117 kali

Kabar Banten ePaper

Safari Malam
SPECIAL
HALLOWEEN NIGHT
TGL. 19 & 20 OKTOBER 2013
COMING SOON TO THE THEATRE
www.kabarpaper.com

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/14889

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

DUGAAN MARK UP SURAT SUARA PILGUB BANTEN 2011, EKS KETUA KPU BANTEN DIPERIKSA

Tuesday, 10 Sep 2013 | 08:11:54 WIB

SERANG, (KB)-
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Hambali, diperiksa tim penyidik Kejati Banten, Senin (9/9), selama enam jam. Hambali diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pencetakan surat suara Pilgub Banten 2011 senilai Rp4,5 miliar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Hambali tiba di Kejati Banten sekitar pukul 08.45 WIB. Kemudian langsung masuk ke ruang pemeriksaan di bagian pidana khusus (pidsus). Pemeriksaan langsung dilakukan ketua tim penyidik, Payaman, SH yang juga Asisten Bidang Pembinaan (Asbin) Kejati Banten. Sekitar pukul 12.00 WIB, pemeriksaan rehat dan dilanjutkan pada 13.00 WIB. Baru sekitar pukul 16.00 WIB, pemeriksaan selesai.

Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Banten, Syamsul Bahri, SH mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPU Banten, Hambali baru pertama kali dilakukan pada tahap penyidikan ini. Sebelumnya, pada tahap penyelidikan Hambali juga sudah diperiksa sebagai saksi.

"Hari ini, penyidik memeriksa mantan Ketua KPU Banten. Harusnya, ada satu saksi lagi yang diperiksa hari ini tapi tidak hadir karena orang tuanya masuk rumah sakit. Dia itu orang yang menyusun dokumen penawaran," ujar Syamsul, SH didampingi Kasi Penyidikan, Eben Silalahi, SH, di kantornya, Senin (9/9).

Syamsul mengatakan, selama minggu ini tim penyidik juga memanggil sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Mereka di antaranya ketua pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pihak rekanan. "Ya, minggu ini kami panggil sekitar 10 orang, kapasitasnya masih sebagai saksi. Senin sampai Kamis," kata Syamsul, SH.

Pengembangan
la menjelaskan, dalam perkara ini penyidik juga sedang melakukan pengembangan untuk kemungkinan adanya tersangka lain. "Kasus KPU ini kemungkinan ada penambahan tersangka, ini sedang kami kembangkan," ujarnya.

Tentang soal rencana penahanan tersangka, Syamsul mengatakan, pihaknya tidak terburu-buru dalam melakukan penahanan. Menurut dia, untuk menahan seseorang harus diperlukan kajian.

"Nanti lah itu belum, masih pendalaman dulu. Untuk menahan orang itu kan tidak sembarangan, jangan sampai merampas hak-hak orang itu. Kan ada rujukannya itu di pasal 21 KUHP," kata Syamsul.

Sebatas tupoksi
Terpisah, mantan Ketua KPU Banten, Hambali, dikonfirmasi membenarkan dirinya diperiksa di Kejati Banten terkait kasus surat suara. Namun, menurut dia, pemeriksaan tersebut masih sebatas tupoksi sebagai ketua KPU.

"Ya, betul. Ya sebatas tupoksi saja, bukan soal pengadaan surat suara," katanya, dihubungi via ponsel, kemarin.

la mengatakan, dirinya akan kembali menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/9). "Belum beres, besok dilanjutkan lagi," ujarnya. (H-42)***

TERKAIT

- > Usut Tuntas Kasus Dana Hibah
- > Kasus Dana Hibah YPI Sholatiyah, Pejabat Pemprov S...
- > Kasus YPI Sholatiyah Belum Ada Tersangka Bantuan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200 Juta Ma...
- > Penerima Hibah Dikumpulkan, Jangan Percayai "Bro..."

Kabar-Banten ePaper

Jadwal Sholat Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

kabar banten | kabar Banten Kritis... | kabar banten septe... | 1:34 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/14707

KABAR BANTEN.com
Grup Pikiran Rakyat

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

TERDAKWA KASUS KORUPSI DI SAMSAT LEBAK LANGSUNG NYANGKAL

Tuesday, 03 Sep 2013 | 22:59:13 WIB

KASUS dugaan korupsi penerimaan setoran pajak bea balik nama kendaraan bermotor baru (BBNKB) R2 di UPT Rangkasbitung (Samsat Lebak) DPKD Banten Rp1,7 miliar tahun 2009-2011, memasuki babak baru. Begitu mendengar dakwaan, terdakwa Dery Felix Syafa'at (kasir samsat), dan Kiki Sukarsah (petugas room control) langsung membantah. Dery didakwa melakukan pengutan pajak motor baru. Sementara terdakwa Kiki didakwa turut membantu kasi dari Dery.

Hai tersebut terungkap dalam sidang dipimpin majelis hakim diketuai Cipta Sinuraya, SH dengan jaksa penuntut umum (JPU) Moch. Mahmud, SH, dan Iwan Sulistyawan, SH di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (2/9). Sidang dilakukan secara bergantian karena berkas terpisah.

Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan, selama November 2009-Desember 2011, nilai surat ketetapan pajak daerah (SKPD) pada Kantor Samsat UPT Rangkasbitung yang ditagihkan dan diterima terdakwa Dery Felix Syafa'at Rp74.533.997,700.

"Sementara penyeroran terdakwa selaku kasir PNB/BBNKB pada Samsat UPT Rangkasbitung kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (sesuai dokumen SAM-III) serta tanda tangan penyeroran bendahara penerimaan pembantu ke kas daerah di Bank Jabar Banten) November 2009-Desember 2011 hanya Rp72.762.077.700," ungkap JPU Moch. Mahmud, SH.

Dari penerimaan BBNKB, PNB, sumbangan wajib dana kekelakaan lali lintas jalan (SWDKLLJ), serta bea administrasi STNK dan BBNKB, terdapat selisih pada penerimaan BBNKB, khususnya BBNKB satu. Yaitu BBNKB satu untuk kendaraan baru dan BBNKB dua mutasibalik nama kendaraan lama.

"Berdasarkan rekapitulasi pemungutan dan penyeroran BBNKB untuk kendaraan bermotor roda dua pada Samsat UPT Rangkasbitung selama November 2009-Desember 2011 terdapat selisih Rp1.781.920.000," kata Mahmud, SH.

Keperentingan pribadi

Dari uang pembayaran BBNKB yang tidak disetorakan sejak November 2009-Desember 2011, katanya, seliap bulannya terdakwa Dery memberikan uang kepada Durahman rata-rata Rp7 juta atau lebih, dan total uang diterima Durahman Rp220 juta yang telah dipergunakan keperluan pribadi Durahman. Sementara sisanya dinikmati Dery dan Kiki," ungkap JPU.

Perbuatan terdakwa Dery bersama-sama dengan saksi Kiki, katanya, sdak sesuai UU No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 16 ayat 2, PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 57 ayat 2.

Menanggapi dakwaan, kedua terdakwa menyatakan akan menyampaikan nota keberatan (eksepsi) pada sidang selanjutnya.

Penasihat hukum Dery, Donal Alfari Pakoahan, SH menyatakan, pihaknya akan membuktikan kliennya tidak melakukan apa yang sebagaimana didakwakan jaksa. "SK dari negara itu klien saya sebagai kasir. Akan tetapi, ditempatkan di Lebak itu bukan sebagai kasir, tapi pembuat kasir," kata Donal, SH. (Riki/KB)***

Dibaca : 61 kali

http://kabar-banten.com/news/detail/14389

Subuh 04:35
Syuruq 05:50
Dzuhur 11:51
Ashar 15:13
Maghrib 17:45
Iya 18:55

Safar Malam
Special
HALLOWEEN NIGHT
10.11.13, 18.11.13 & 25.11.13
SANGGAR SOROT
www.sanggar-sorot.com

TERKAIT

- Saksi dan Terdakwa Saling Tuduh di PN
- Terdakwa Kasus Korupsi Samsat Lebak Segera Diadili
- Lebaran, Pelimpahan K
- Lebak Dit...
- Dua Tersangka Kasus Korupsi Samsat Lebak Ditahan
- Kasus Dugaan Korupsi Samsat Lebak, Polda Batalkan ...

Terdakwa Kasus Korupsi Samsat Lebak Segera Diadili

